



PERSEPSI GURU SWASTA TENTANG AKREDITASI DAN DINAMIKA IKLIM SEKOLAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO: 3/PUU-XXIII/2025

Bachtiar Hariyadi¹

¹ STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Indonesia

Email: schoolbook68@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i3.774>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 July 2025

Final Revised: 15 August 2025

Accepted: 10 September 2025

Published: 21 September 2025

Keywords:

Teacher Perceptions

Accreditation

School Climate

Constitutional Court



ABSTRACT

School climate plays a crucial role in determining educational effectiveness. School climate encompasses interactions between teachers, students, and management, as well as a work environment that supports learning. The Constitutional Court Ruling No: 3/PUU-XXIII/2025 mandates the government to ensure free compulsory education for all primary education institutions, including private schools, presenting both challenges and opportunities for accreditation and school climate. This study aims to understand private school teachers' perceptions of accreditation and school climate dynamics following the ruling. Using a qualitative approach, data were collected through semi-structured interviews and non-participant observations from 20 teachers in five private primary schools in East Java. Thematic analysis revealed that 70% of teachers view accreditation as a tool for quality improvement, while 25% feel burdened by administrative demands. School climate showed increased teacher collaboration (80%), but tensions with management arose due to funding uncertainties. Parental expectations for educational quality also rose. The ruling offers opportunities for government support, but funding and administrative challenges must be addressed. The study recommends clear funding guidelines and teacher training to support private schools.

ABSTRAK

Iklm sekolah memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas pendidikan. Iklim sekolah mencakup interaksi antar guru, siswa, dan manajemen, serta lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 3/PUU-XXIII/2025 mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan dasar wajib secara gratis bagi seluruh lembaga pendidikan dasar, termasuk sekolah swasta. Hal ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam proses akreditasi dan iklim sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi guru sekolah swasta terhadap akreditasi dan dinamika iklim sekolah pasca putusan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipan terhadap 20 guru di lima sekolah dasar swasta di Jawa Timur. Analisis tematik menunjukkan bahwa 70% guru memandang akreditasi sebagai alat untuk peningkatan mutu, sementara 25% merasa terbebani oleh tuntutan administratif. Iklim sekolah menunjukkan peningkatan kolaborasi antarguru (80%), namun juga muncul ketegangan dengan pihak manajemen akibat ketidakpastian pendanaan. Harapan orang tua terhadap mutu pendidikan juga meningkat. Putusan ini membuka peluang dukungan dari pemerintah, tetapi tantangan pendanaan dan administratif perlu segera ditangani. Studi ini merekomendasikan adanya pedoman pendanaan yang jelas serta pelatihan bagi guru untuk mendukung keberlangsungan sekolah swasta.

Kata kunci: Persepsi Guru, Akreditasi, Iklim Sekolah, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan nasional, dan sekolah swasta memainkan peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah swasta tidak hanya melengkapi layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, tetapi juga memberikan alternatif bagi masyarakat yang mencari pendidikan berkualitas dengan karakteristik tertentu, seperti pendekatan keagamaan atau kurikulum khusus. Dalam konteks ini, akreditasi sekolah menjadi indikator kunci untuk menjamin standar mutu pendidikan. Akreditasi, yang dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), mengevaluasi berbagai aspek, termasuk kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan manajemen sekolah. Bagi sekolah swasta, akreditasi bukan hanya alat untuk memastikan kualitas, tetapi juga faktor yang memengaruhi daya tarik bagi siswa dan orang tua, serta akses terhadap dukungan pemerintah.

Selain akreditasi, iklim sekolah memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas pendidikan. Iklim sekolah mencakup interaksi antar guru, siswa, dan manajemen, serta lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran. Penelitian oleh Hoy & Miskel (2008) menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif berkorelasi dengan motivasi guru, kepuasan kerja, dan prestasi siswa. Dalam konteks sekolah swasta, iklim sekolah sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah atau perubahan regulasi pendanaan. Oleh karena itu, perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 3/PUU-XXIII/2025, dapat memiliki dampak signifikan terhadap operasional sekolah swasta dan persepsi guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikan.

Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa pungutan biaya, yang berlaku untuk semua satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun, bagi sekolah swasta, yang sering kali bergantung pada biaya dari orang tua siswa untuk operasional dan peningkatan kualitas, putusan ini menimbulkan tantangan baru. Sekolah swasta harus beradaptasi dengan model pendanaan baru, seperti hibah pemerintah atau alokasi anggaran daerah, sambil tetap memenuhi standar akreditasi. Selain itu, perubahan ini dapat memengaruhi iklim sekolah, termasuk motivasi guru, hubungan dengan manajemen, dan ekspektasi terhadap kualitas pendidikan. Guru, sebagai pelaksana utama di lapangan, memiliki persepsi yang dapat memengaruhi respons mereka terhadap kebijakan ini, baik dalam hal penerimaan terhadap akreditasi maupun adaptasi terhadap dinamika iklim sekolah.

Meskipun banyak penelitian telah mengeksplorasi peran akreditasi dan iklim sekolah dalam pendidikan (Rose & Sughrue, 2021; Thapa et al., 2013; Widayati et al., 2021), terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait bagaimana kebijakan pendidikan besar, seperti putusan MK, memengaruhi persepsi guru swasta dan dinamika iklim sekolah. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada sekolah negeri atau dampak kebijakan pendanaan di negara berkembang secara umum (Shaturaev, 2022). Penelitian spesifik tentang sekolah swasta di Indonesia pasca kebijakan pendidikan gratis masih terbatas, terutama dalam memahami bagaimana guru swasta memandang akreditasi sebagai alat mutu dan bagaimana kebijakan ini mengubah interaksi dalam iklim sekolah. Kesenjangan ini menjadi semakin relevan mengingat peran strategis guru dalam implementasi kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi guru sekolah swasta terhadap akreditasi

dan dinamika iklim sekolah pasca Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada bagaimana guru swasta memaknai proses akreditasi dalam konteks pendanaan baru dan bagaimana kebijakan ini memengaruhi hubungan antarguru, hubungan guru-manajemen, serta lingkungan kerja secara keseluruhan. Terdapat dua pertanyaan penelitian dalam studi ini, yaitu (1) Bagaimana persepsi guru swasta terhadap akreditasi sekolah setelah implementasi Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025? (2) Bagaimana dinamika iklim sekolah di sekolah swasta berubah sebagai respons terhadap kebijakan wajib belajar tanpa biaya? Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan untuk mendukung sekolah swasta dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru sambil menjaga kualitas pendidikan.

Persepsi Guru terhadap Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas pendidikan, yang mencakup aspek seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan manajemen sekolah. Dalam konteks pendidikan, persepsi guru terhadap akreditasi memainkan peran penting karena guru adalah pelaksana utama proses pembelajaran. Menurut Bandura (1997), dalam teori efikasi diri (self-efficacy), persepsi individu terhadap suatu kebijakan atau proses dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap kemampuan untuk menghadapi tantangan yang terkait. Dalam hal akreditasi, guru dengan efikasi diri yang tinggi cenderung memandang proses ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pengajaran, sementara guru dengan efikasi diri rendah mungkin melihatnya sebagai beban administratif (Tschannen-Moran & Hoy, 2001).

Penelitian oleh Fernandes et al. (2023) and Leibur et al. (2021) menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap akreditasi dipengaruhi oleh faktor seperti dukungan manajerial, pelatihan, dan ketersediaan sumber daya. Dalam konteks Indonesia, studi oleh Fadhillah et al. (2024) menemukan bahwa guru di sekolah swasta sering kali merasa tertekan oleh persyaratan akreditasi karena keterbatasan pendanaan dan infrastruktur dibandingkan sekolah negeri. Namun, akreditasi juga dipandang sebagai alat untuk meningkatkan reputasi sekolah dan daya tarik bagi orang tua siswa (Adiyaman & Özmantar, 2023). Meskipun demikian, literatur tentang persepsi guru swasta terhadap akreditasi pasca perubahan kebijakan pendanaan masih terbatas, terutama dalam konteks kebijakan pendidikan gratis.

Iklim Sekolah dan Dinamikanya

Iklim sekolah didefinisikan sebagai persepsi bersama tentang lingkungan kerja sekolah, yang mencakup hubungan antarguru, guru-siswa, dan guru-manajemen, serta norma dan nilai yang membentuk interaksi sosial di sekolah (Hoy & Miskel, 2008). Teori iklim sekolah oleh Hoy dan Miskel menekankan bahwa iklim sekolah yang positif, ditandai dengan kolaborasi, dukungan, dan komunikasi yang terbuka, berkontribusi pada motivasi guru dan prestasi siswa. Sebaliknya, iklim sekolah yang negatif dapat menyebabkan stres kerja dan penurunan kinerja (Elomaa et al., 2023; Mulyani et al., 2021; Schoger, 2025).

Penelitian global menunjukkan bahwa iklim sekolah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pendidikan dan pendanaan. Misalnya, studi oleh Ortan et al. (2021) and Toropova et al. (2021) di Amerika Serikat menemukan bahwa perubahan kebijakan pendanaan sekolah memengaruhi hubungan antarguru dan kepuasan kerja. Di Indonesia, penelitian oleh (Hariyadi, 2023) mengungkapkan bahwa sekolah swasta sering kali menghadapi tantangan dalam menciptakan iklim sekolah yang positif karena ketidakpastian pendanaan dan tekanan untuk memenuhi standar akreditasi. Selain itu, dinamika iklim sekolah juga dipengaruhi oleh

persepsi guru terhadap keadilan dalam distribusi sumber daya dan dukungan dari manajemen (Konishi et al., 2022; Veletić et al., 2023).

Kebijakan Pendidikan Gratis dan Dampaknya

Kebijakan pendidikan gratis telah menjadi fokus utama di banyak negara untuk memastikan akses pendidikan yang setara. Penelitian oleh (Dinerstein & Smith, 2021) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis dapat mengurangi beban finansial keluarga, tetapi sering kali menimbulkan tantangan bagi sekolah swasta yang bergantung pada biaya siswa. Di Indonesia, program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah membantu sekolah swasta, tetapi tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional (Shaturaev, 2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 3/PUU-XXIII/2025, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin wajib belajar tanpa pungutan biaya untuk semua satuan pendidikan dasar, memperluas cakupan kebijakan ini ke sekolah swasta.

Putusan ini memiliki implikasi signifikan bagi operasional sekolah swasta. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang untuk meningkatkan akses pendidikan dan dukungan pemerintah melalui hibah atau anggaran daerah. Namun, tantangan seperti ketidakpastian alokasi dana, peningkatan pengawasan terhadap akreditasi, dan tekanan untuk mempertahankan kualitas pendidikan menjadi isu utama. Selain itu, kebijakan ini dapat mengubah dinamika iklim sekolah, termasuk hubungan guru-manajemen, karena adanya perubahan dalam struktur pendanaan dan ekspektasi terhadap kinerja guru (Bradshaw et al., 2021; Kapelela et al., 2025; Narayanan et al., 2024).

Meskipun literatur tentang akreditasi dan iklim sekolah cukup banyak, terdapat kesenjangan penelitian tentang bagaimana kebijakan pendidikan gratis, khususnya Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025, memengaruhi persepsi guru swasta dan dinamika iklim sekolah di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada sekolah negeri atau dampak kebijakan pendanaan di konteks global (Hanushek & Woessmann, 2020). Penelitian tentang sekolah swasta di Indonesia cenderung membahas isu pendanaan secara umum tanpa mengkaji persepsi guru secara mendalam (Husyairi et al., 2025). Selain itu, sedikit penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara akreditasi dan iklim sekolah dalam konteks perubahan kebijakan besar, seperti yang dihasilkan oleh putusan MK.

Relevansi Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025

Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025 menempatkan sekolah swasta pada posisi yang kompleks. Secara teoretis, kebijakan ini dapat meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, dalam praktiknya, sekolah swasta mungkin menghadapi tantangan seperti penurunan pendapatan dari biaya siswa, peningkatan ketergantungan pada dana pemerintah, dan tekanan untuk memenuhi standar akreditasi yang lebih ketat (Devi, 2025). Guru, sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan ini, kemungkinan akan mengalami perubahan dalam persepsi mereka terhadap akreditasi, baik sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas maupun sebagai beban tambahan. Selain itu, dinamika iklim sekolah dapat berubah akibat perubahan dalam alokasi sumber daya, hubungan dengan manajemen, dan ekspektasi dari orang tua siswa (Trinidad, 2024).

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dari teori iklim sekolah Hoy & Miskel (2008) untuk menganalisis dinamika interaksi dalam sekolah swasta, serta teori efikasi diri Bandura (1997) untuk memahami persepsi guru terhadap akreditasi. Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan gratis memengaruhi guru swasta dan

lingkungan kerja mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi guru swasta terhadap akreditasi dan dinamika iklim sekolah pasca Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami makna mendalam dari pengalaman dan pandangan guru secara kontekstual. Populasi penelitian adalah guru sekolah dasar swasta di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan sampel sebanyak 20 guru dari lima sekolah swasta terakreditasi, dipilih melalui purposive sampling untuk memastikan representasi beragam berdasarkan pengalaman mengajar dan status akreditasi sekolah.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menangkap persepsi guru terhadap akreditasi dan dinamika iklim sekolah. Panduan wawancara dirancang berdasarkan teori efikasi diri Bandura (1997) dan teori iklim sekolah (Hoy & Miskel, 2008), berfokus pada persepsi terhadap proses akreditasi, tantangan pendanaan, dan interaksi dalam lingkungan sekolah. Setiap wawancara berdurasi 45-60 menit, direkam dengan izin peserta, dan dilakukan secara tatap muka di lokasi sekolah. Observasi non-partisipatif juga dilakukan untuk mengamati dinamika iklim sekolah, seperti interaksi guru-manajemen dan kolaborasi antarguru.

Analisis data menggunakan pendekatan tematik, mengikuti langkah Braun & Clarke (2022), meliputi transkripsi, pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (wawancara dan observasi) serta peer debriefing dengan peneliti lain. Reliabilitas instrumen wawancara diuji melalui uji coba panduan pada lima guru di luar sampel utama. Etika penelitian dipatuhi dengan memperoleh informed consent dari peserta, menjamin kerahasiaan data, dan memastikan partisipasi sukarela. Penelitian ini telah disetujui oleh komite etik universitas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengeksplorasi persepsi guru sekolah swasta terhadap akreditasi dan dinamika iklim sekolah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 3/PUU-XXIII/2025 tentang wajib belajar tanpa biaya. Data dikumpulkan dari 20 guru di lima sekolah dasar swasta terakreditasi di Jawa Timur melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif. Analisis tematik menghasilkan tiga tema utama: (1) persepsi terhadap akreditasi, (2) dinamika iklim sekolah, dan (3) tantangan serta peluang pasca putusan MK.

Persepsi Guru terhadap Akreditasi

Observasi menunjukkan bahwa sekolah dengan akreditasi Unggul lebih optimis terhadap putusan MK dibandingkan sekolah dengan akreditasi Baik Sekali atau Baik, yang mengkhawatirkan keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan wawancara, 70% guru memandang akreditasi sebagai alat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga sebagai sumber tekanan administratif. Seorang guru menyatakan:

"Akreditasi membantu kami menjaga standar, tetapi setelah putusan MK, kami khawatir pendanaan terbatas akan menyulitkan pemenuhan syarat akreditasi."

Tabel 1 Rangkuman Persepsi Guru

Persepsi	Persentase Guru	Kutipan Representatif
Akreditasi meningkatkan kualitas	70%	"Akreditasi mendorong kami untuk lebih profesional, tetapi butuh dukungan dana yang jelas."
Akreditasi sebagai beban	25%	"Terlalu banyak dokumen, kami kurang waktu untuk fokus mengajar."
Tidak yakin	5%	"Saya belum paham bagaimana putusan ini memengaruhi akreditasi kami."

Dinamika Iklim Sekolah

Dinamika iklim sekolah menunjukkan perubahan signifikan pasca putusan MK. Tiga aspek utama yang muncul adalah kolaborasi antarguru, hubungan guru-manajemen, dan interaksi dengan orang tua siswa.

1. **Kolaborasi Antarguru:** 80% guru melaporkan peningkatan kolaborasi untuk memenuhi standar akreditasi, seperti berbagi strategi pengajaran. Namun, beberapa guru (15%) merasa terbebani oleh tanggung jawab tambahan.
"Kami lebih sering rapat untuk membahas kurikulum, tapi ini mengurangi waktu persiapan mengajar," kata seorang guru senior.
2. **Hubungan Guru-Manajemen:** Observasi menunjukkan ketegangan di tiga sekolah akibat ketidakpastian pendanaan. Guru melaporkan komunikasi manajemen yang kurang transparan tentang alokasi dana pemerintah.
3. **Interaksi dengan Orang Tua:** 60% guru mencatat meningkatnya ekspektasi orang tua terhadap kualitas pendidikan tanpa biaya, yang memengaruhi dinamika kelas.

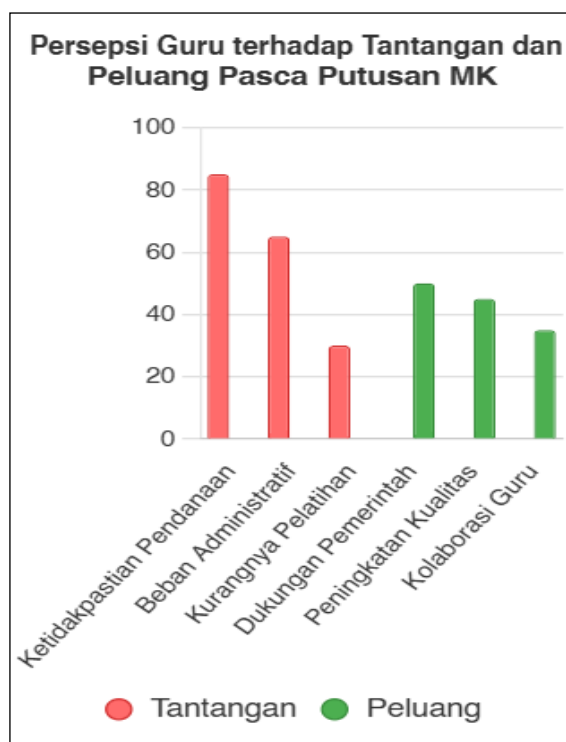
Tantangan dan Peluang

Tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakpastian pendanaan, yang menjadi perhatian 85% responden, karena sekolah swasta bergantung pada dana pemerintah pasca Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025, yang mewajibkan wajib belajar tanpa biaya. Ketidakjelasan alokasi dana menghambat pemenuhan standar akreditasi dan operasional sekolah, menyebabkan kekhawatiran tentang keberlanjutan kualitas pendidikan. Selain itu, 65% guru melaporkan peningkatan beban administratif, seperti penyusunan dokumen akreditasi, yang mengurangi waktu untuk mengajar dan inovasi. Meskipun demikian, 50% guru melihat peluang dalam dukungan pemerintah yang lebih besar, seperti hibah untuk pelatihan guru, yang dapat meningkatkan kompetensi profesional, serta dana untuk infrastruktur, seperti laboratorium dan perpustakaan, yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Peluang ini dapat memperkuat posisi sekolah swasta jika didukung oleh kebijakan yang transparan dan implementasi yang efektif.

Ketidakpastian pendanaan sebagai konsekuensi dari kebijakan pendidikan gratis memang menjadi tantangan umum bagi sekolah swasta di berbagai negara berkembang. Studi oleh Bray (2021) menegaskan bahwa ketika kebijakan pendidikan bebas biaya diberlakukan tanpa skema pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan, sekolah swasta sering kali mengalami tekanan fiskal yang signifikan, terutama dalam memenuhi standar mutu dan akreditasi. Ketergantungan pada dana pemerintah tanpa mekanisme alokasi yang transparan

memperbesar risiko disrupsi operasional. Selain itu, beban administratif yang meningkat seringkali tidak diimbangi dengan dukungan teknis atau sumber daya tambahan, sehingga membebani guru dan mengganggu proses pembelajaran (Hanushek & Woessmann, 2020). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan sekolah swasta melalui kebijakan afirmatif dan pendanaan berbasis kinerja menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan mutu pendidikan

Grafik berikut ini menunjukkan distribusi persepsi terhadap tantangan dan peluang pasca putusan Mahkamah Konstitusi:



Gambar: Grafik Persepsi Guru terhadap Tantangan dan Peluang Pasca Putusan MK

Pembahasan

Persepsi Guru terhadap Akreditasi

Temuan menunjukkan bahwa mayoritas guru memandang akreditasi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sejalan dengan penelitian Skaalvik & Skaalvik (2017), yang menegaskan bahwa persepsi positif terhadap akreditasi terkait dengan efikasi diri guru. Namun, tekanan administratif yang dirasakan oleh 25% guru mencerminkan temuan (Lase et al., 2024), yang menyebutkan bahwa sekolah swasta di Indonesia sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi standar akreditasi. Putusan MK No: 3/PUU-XXIII/2025 memperumit situasi ini karena sekolah swasta harus menyesuaikan model pendanaan tanpa biaya siswa, yang meningkatkan ketergantungan pada dana pemerintah. Hal ini memengaruhi persepsi guru, terutama di sekolah dengan akreditasi lebih rendah, yang merasa kurang siap menghadapi persyaratan ketat akreditasi tanpa dukungan finansial yang memadai.

Teori efikasi diri Bandura (1977) relevan di sini, karena guru dengan efikasi diri tinggi cenderung melihat akreditasi sebagai peluang untuk meningkatkan profesionalisme, sementara guru dengan efikasi rendah merasa terbebani. Temuan ini menunjukkan perlunya

pelatihan dan dukungan manajerial untuk meningkatkan kepercayaan diri guru dalam menghadapi akreditasi pasca putusan MK.

Dampak Putusan MK terhadap Iklim Sekolah

Putusan MK memengaruhi iklim sekolah melalui perubahan dalam kolaborasi, hubungan guru-manajemen, dan interaksi dengan orang tua. Peningkatan kolaborasi antarguru sejalan dengan teori iklim sekolah (Hoy & Miskel, 2008), yang menegaskan bahwa iklim sekolah yang positif ditandai dengan kerja sama yang kuat. Namun, ketegangan dalam hubungan guru-manajemen, terutama akibat ketidakpastian pendanaan, mencerminkan temuan (Thapa et al., 2013), yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendanaan dapat mengganggu dinamika sekolah. Kurangnya transparansi manajemen tentang alokasi dana pemerintah memperburuk situasi, menyebabkan ketidakpercayaan di beberapa sekolah.

Interaksi dengan orang tua juga berubah, dengan meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas pendidikan tanpa biaya. Hal ini menciptakan tekanan tambahan pada guru, yang harus menyeimbangkan tuntutan akreditasi dan harapan orang tua. Penelitian oleh Kusuma et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis sering kali meningkatkan ekspektasi publik, tetapi tanpa dukungan yang memadai, sekolah swasta kesulitan memenuhi harapan tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkap dinamika kompleks yang dihadapi guru sekolah swasta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXIII/2025 mengenai wajib belajar tanpa biaya. Para guru menunjukkan sikap ambivalen terhadap akreditasi. Di satu sisi, mereka melihatnya sebagai instrumen penting untuk menjaga mutu pendidikan dan meningkatkan legitimasi institusi di mata masyarakat. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait peningkatan beban administratif dan ketidakjelasan sumber pendanaan. Ketika tuntutan kualitas tetap tinggi tetapi tidak diiringi dukungan teknis dan finansial dari pemerintah, guru dihadapkan pada dilema antara idealisme mutu dan realitas keterbatasan.

Lebih jauh, kebijakan ini juga mengubah iklim sekolah. Pengelola menghadapi tekanan untuk mempertahankan kualitas layanan pendidikan dengan sumber daya yang terbatas. Meskipun beberapa sekolah mengalami peningkatan solidaritas di antara guru, tidak sedikit pula yang menghadapi ketegangan, kekhawatiran, bahkan ketidakpastian akan keberlangsungan lembaga. Iklim kerja menjadi lebih kompetitif, namun juga memicu refleksi manajerial dan dorongan untuk melakukan inovasi kelembagaan.

Dalam konteks ini, dukungan pemerintah menjadi krusial. Diperlukan panduan alokasi dana yang adil dan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru, agar mereka tidak hanya mampu memenuhi tuntutan akreditasi, tetapi juga tetap fokus pada pengajaran yang bermakna. Di sisi lain, manajemen sekolah swasta perlu membangun komunikasi yang lebih transparan dan memberdayakan guru, termasuk melalui penguatan efikasi diri. Penelitian lanjutan dengan pendekatan longitudinal diperlukan karena tidak hanya memberikan pemahaman atas respons guru terhadap kebijakan baru, tetapi juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor agar pendidikan swasta tetap menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang inklusif dan bermutu.

REFERENSI

Adiyaman, H., & Özmantar, Z. K. (2023). Impact of accreditation on schools: An examination in terms of open system elements. *Participatory Educational Research*, 10(2), 174–194.

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2). <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Macmillan.
- Bandura, A., & Wessels, S. (1997). *Self-efficacy*. Cambridge University Press Cambridge.
- Bradshaw, C. P., Cohen, J., Espelage, D. L., & Nation, M. (2021). Addressing school safety through comprehensive school climate approaches. *School Psychology Review*, 50(2–3), 221–236.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3.
- Bray, T. M. (2021). *Shadow education in Africa: Private supplementary tutoring and its policy implications*. Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.
- Devi, Y. N. (2025). *Schooling VS Learning: The Perspective between Formal and Nonformal Education*. Indonesia Emas Group.
- Elomaa, M., Eskelä-Haapanen, S., Pakarinen, E., Halttunen, L., & Lerkkanen, M.-K. (2023). Work-related stress of elementary school principals in Finland: Coping strategies and support. *Educational Management Administration & Leadership*, 51(4), 868–888.
- Fadhilah, A., Ramadani, R., Sandy, S., Aslamiah, A., & Cinantya, C. (2024). AKREDITASI SEKOLAH DAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4951–4964.
- Fernandes, S., Araújo, A. M., Miguel, I., & Abelha, M. (2023). Teacher professional development in higher education: The impact of pedagogical training perceived by teachers. *Education Sciences*, 13(3), 309.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The economic impacts of learning losses*.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2008). School effectiveness. *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*, 34(2), 299–308.
- Husyairi, M., Wardiyanto, B., & Setujaningrum, E. (2025). THE GREY AREA OF EDUCATION POLICY IN EAST JAVA: AN ANALYSIS FROM PUBLIC PERCEPTION. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(02), 90–105.
- Kapelela, C., Mislal, M. A., & Manyengo, P. R. (2025). The politics of school governance in the context of education decentralisation policy reforms in selected public secondary schools in Tanzania. *Cogent Education*, 12(1), 2442251.
- Konishi, C., Wong, T. K. Y., Persram, R. J., Vargas-Madriz, L. F., & Liu, X. (2022). Reconstructing the concept of school climate. *Educational Research*, 64(2), 159–175.
- Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihayati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai benang kusut kebijakan pendidikan Indonesia: Sebuah literature review analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1810–1826.
- Lase, J. G. F., Ndraha, A. B., Lase, H., & Zega, Y. (2024). Evaluasi Standar Akreditasi Sekolah Perspektif Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Swasta ST Theresia Lahewa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1653–1664.
- Leibur, T., Saks, K., & Chounta, I.-A. (2021). Towards acquiring teachers' professional qualification based on professional standards: Perceptions, expectations and needs on the application process. *Education Sciences*, 11(8), 391.
- Mulyani, S., Salameh, A. A., Komariah, A., Timoshin, A., Hashim, N. A. A. N., Fauziah, R. S. P., Mulyaningsih, M., Ahmad, I., & Ul din, S. M. (2021). Emotional regulation as a remedy for teacher burnout in special schools: Evaluating school climate, teacher's work-life balance and children behavior. *Frontiers in Psychology*, 12, 655850.
- Narayanan, M., Shields, A. L., & Delhagen, T. J. (2024). Autonomy in the spaces: Teacher

- autonomy, scripted lessons, and the changing role of teachers. *Journal of Curriculum Studies*, 56(1), 17–34.
- Ortan, F., Simut, C., & Simut, R. (2021). Self-efficacy, job satisfaction and teacher well-being in the K-12 educational system. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23), 12763.
- Rose, A. L., & Sughrue, J. A. (2021). Professional development needs of novice alternatively certified teachers in Florida: Teachers' perspectives. *Teacher Development*, 25(4), 449–464.
- Schoger, L. I. (2025). Coping with work-related stressors: does education reduce work-related stress? *Journal of Public Health*, 33(5), 1123–1134.
- Shaturaev, J. (2022). Financing public education in Indonesia. *Архив Научных Исследований*, 2(1).
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2017). Teacher stress and teacher self-efficacy: Relations and consequences. In *Educator stress: An occupational health perspective* (pp. 101–125). Springer.
- Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D'Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. *Review of Educational Research*, 83(3), 357–385.
- Toropova, A., Myrberg, E., & Johansson, S. (2021). Teacher job satisfaction: the importance of school working conditions and teacher characteristics. *Educational Review*, 73(1), 71–97.
- Trinidad, J. E. (2024). An organizational sociology of education: Using structural, network, and ecological perspectives to study schools. *Sociological Inquiry*, 94(4), 968–993.
- Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17(7), 783–805.
- Veletić, J., Price, H. E., & Olsen, R. V. (2023). Teachers' and principals' perceptions of school climate: the role of principals' leadership style in organizational quality. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 35(4), 525–555.
- Widayati, A., MacCallum, J., & Woods-McConney, A. (2021). Teachers' perceptions of continuing professional development: a study of vocational high school teachers in Indonesia. *Teacher Development*, 25(5), 604–621.

Copyright holde:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA